



Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



TAHUN 2025-2030

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jalan Bakau Kelurahan Tungkal III
Kecamatan Tungkal Ilir
Kuala Tungkal



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Bakau Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir

Email: kopperindag.tanjjab18@gmail.com

Kuala Tungkal

Kode Pos : 36513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : 800.1/08/Diskopperindag/2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025-2030**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian kinerja perangkat daerah, diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama dimaksud digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2030.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada Tanggal : 24 Februari 2026

Y Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I

Pembina TK.I

NIP. 19780506 201101 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. KABUPATEN : Tanjung Jabung Barat
2. OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. TUGAS DAN FUNGSI : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Kinerja Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1. Jumlah koperasi yang aktif	Kepala Dinas	Jumlah koperasi aktif tahun (n) Definisi Operasional: Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).	Bidang Koperasi Diskopperindag	Data Keragaan Koperasi
		2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kepala Dinas	Jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil tahun (n) Definisi Operasional: Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	Bidang Usaha Mikro Diskopperindag	Database Bidang Usaha Mikro

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
2	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	1. Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah	Kepala Dinas	Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah tahun (n) dibanding persentase volume pemasaran produk unggulan daerah tahun lalu (n-1) Definisi Operasional: Persentase volume pemasaran produk unggulan daerah pada tahun (n) dibanding dengan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah tahun sebelumnya (n-1).	Bidang Perdagangan dan Pasar Diskopperindag	Database Bidang Perdagangan dan Pasar
		2. Jumlah sarana Pemasaran yang layak dan representatif	Kepala Dinas	Jumlah pasar yang layak dan berfungsi tahun (n) Definisi Operasional: Jumlah pasar atau sarana pemasaran yang memenuhi standar kelayakan fungsi dan fasilitas operasional serta aktif digunakan sebagai tempat pemasaran produk pada tahun berjalan (n) sesuai dengan data yang tercatat pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.	Bidang Perdagangan dan Pasar Diskopperindag	Database Bidang Perdagangan dan Pasar
		3. Peningkatan ekspor non migas	Kepala Dinas	Jumlah nilai ekspor tahun (n) dikurang jumlah nilai ekspor tahun lalu (n-1) Definisi Operasional: Nilai ekspor komoditas non migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun (n) terhadap nilai ekspor komoditas non migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun sebelumnya (n-1).	Bidang Perdagangan dan Pasar Diskopperindag	Database Bidang Perdagangan dan Pasar
		4. Persentase produk yang tepat ukur	Kepala Dinas	Jumlah produk yang tepat ukur tahun (n) dibanding total produk yang diukur tahun (n) dikali 100% Definisi Operasional: Persentase jumlah produk atau barang yang telah memenuhi ketentuan standar ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) pada tahun berjalan (n) dibandingkan dengan total produk yang diukur tahun berjalan (n), berdasarkan hasil pengawasan dan pembinaan tera atau tera ulang yang tercatat pada bidang metrologi legal pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.	Bidang Perdagangan dan Pasar Diskopperindag	Database Bidang Perdagangan dan Pasar

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
3	Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah	1. Jumlah sentra industri	Kepala Dinas	Jumlah Sentra Industri tahun (n) Definisi Operasional: Sentra Industri adalah tempat tertentu dimana banyak pelaku usaha yang memproduksi jenis barang yang sama atau sejenis yang berkumpul dalam satu lokasi.	Bidang Perindustrian Diskopperindag	Database Bidang Perindustrian
		2. Jumlah usaha industri	Kepala Dinas	Jumlah Usaha Industri tahun (n) Definisi Operasional: Jumlah Usaha Industri adalah total atau banyaknya unit usaha yang bergerak di bidang produksi pengolahan yang ada.	Bidang Perindustrian Diskopperindag	Database Bidang Perindustrian
		3. Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan	Kepala Dinas	Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan tahun (n) Definisi Operasional: Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan adalah banyaknya atau total usaha yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah untuk menjalankan kegiatan industri dan/atau perdagangan.	Bidang Perindustrian Diskopperindag dan DPMPTSP	Database Bidang Perindustrian dan DPMPTSP
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Dinas	SKM = Total dari nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang dinilai dikali 100% Definisi Operasional: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat adalah nilai rata-rata persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah.	Hasil Survey	Diskopperindag

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I

Pembina TK.I

NIP. 19780506 201101 1 001